

**MENUJU DESA/KELURAHAN SEHAT IKLIM (DEKSI)
MEMBANGUN KETAHANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026.**



Pendahuluan

Perubahan iklim saat ini bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi salah satu tantangan penting bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, kejadian cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta perubahan kondisi lingkungan dapat memengaruhi pola penyakit, meningkatkan risiko kejadian luar biasa, mengganggu ketahanan pangan dan air, serta memberikan tekanan terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui *Laporan Penilaian Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Kesehatan di Indonesia* tahun 2025 menegaskan bahwa perubahan iklim dapat memberikan dampak terhadap penyakit sensitif iklim, sistem pelayanan kesehatan, lingkungan, serta kelompok masyarakat yang rentan. Penilaian kerentanan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi iklim, kejadian penyakit sensitif iklim, bencana, kualitas lingkungan, kondisi geografis, kependudukan, kelompok rentan, sosial ekonomi, perilaku masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Kabupaten Banyumas, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena wilayah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi dan lingkungan yang beragam. Kabupaten Banyumas memiliki 40 Puskesmas dan 331 Desa/Kelurahan yang menjadi basis pelayanan kesehatan sekaligus basis pemberdayaan masyarakat.

Atas dasar tersebut, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas di Tahun 2026 mulai merintis konsep Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI) sebagai salah satu pendekatan untuk membangun masyarakat yang lebih siap, tangguh dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai langkah awal, Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja, wilayah kerja Puskesmas Sokaraja II, ditetapkan sebagai lokasi rintisan atau *pilot project* pengembangan DEKSI di Kabupaten Banyumas. Pengembangan DEKSI diharapkan menjadi sebuah model yang dapat dipelajari, dievaluasi dan selanjutnya dikembangkan secara bertahap di Desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Banyumas.

Perubahan Iklim dan Tantangan Kesehatan Masyarakat.

Perubahan iklim mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan masyarakat. Perubahan suhu dan pola hujan dapat memengaruhi lingkungan tempat manusia hidup, perkembangan vektor penyakit, ketersediaan air, kualitas udara, ketahanan pangan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dokumen Kementerian Kesehatan tahun 2025

menjelaskan sejumlah dampak perubahan iklim yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain panas ekstrem, kualitas udara, penyakit yang ditularkan oleh vektor, penyakit yang ditularkan melalui air (*Water borne disease*), *Airborne disease*, ketahanan pangan, akses layanan kesehatan serta dampak ekonomi.

1. Panas Ekstrem

Peningkatan suhu dan kejadian panas ekstrem dapat memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan terutama pada kelompok rentan. Kelompok seperti bayi dan anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah, pekerja luar ruangan serta kelompok rentan lainnya memerlukan perhatian khusus dalam menghadapi perubahan suhu dan cuaca ekstrem. Karena itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan mengenai tanda-tanda gangguan kesehatan akibat panas, pentingnya kecukupan air minum, perlindungan dari paparan panas serta pengaturan aktivitas pada kondisi cuaca ekstrem.

2. Penyakit Yang Ditularkan Oleh Vektor.

Perubahan suhu, kelembaban dan pola curah hujan dapat mempengaruhi ekosistem vektor penyakit. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Dokumen penilaian nasional menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi yang mendukung perkembangan vektor dan penularan penyakit. Oleh sebab itu, pengendalian vektor harus menjadi bagian penting dari upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat masyarakat. Gerakan pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah dan air, pemantauan jentik secara berkala serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah yang dapat dilakukan secara bersama-sama.

3. Penyakit Yang Ditularkan Melalui Air (*Water borne disease*).

Perubahan iklim juga dapat memengaruhi ketersediaan dan kualitas air. Banjir dapat meningkatkan risiko pencemaran sumber air, sementara kekeringan dapat mengurangi ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi. Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk menjaga sumber air, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengelola sanitasi dengan baik serta memastikan keamanan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Ketahanan Pangan

Perubahan pola cuaca dapat memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan kesehatan. Gangguan produksi pangan dapat berdampak terhadap

ketersediaan, akses dan kualitas pangan masyarakat. Pada tingkat Desa, penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan pekarangan pangan, diversifikasi pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan bergizi.

5. Gangguan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan

Perubahan iklim dan bencana dapat mengganggu akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem atau kondisi geografis tertentu dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memiliki kemampuan untuk tetap memberikan pelayanan pada kondisi kedaruratan maupun bencana. Konsep tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam membangun Desa yang memiliki ketahanan kesehatan terhadap perubahan iklim.

Mengapa Kabupaten Banyumas Perlu Mengembangkan DEKSI?

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik Desa/Kelurahan yang beragam. Kondisi lingkungan, kepadatan penduduk, karakteristik sosial ekonomi, akses pelayanan kesehatan, serta potensi ancaman bencana dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan jumlah 40 Puskesmas dan 331 Desa/Kelurahan, pembangunan ketahanan kesehatan berbasis wilayah menjadi sangat strategis. Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan upaya promotif serta preventif.

Di sisi lain, Desa/Kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, perilaku, penyakit menular, ketahanan pangan maupun kesiapsiagaan bencana pada akhirnya sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat di tingkat Desa. Karena itu, pendekatan DEKSI diarahkan untuk mempertemukan dua kekuatan tersebut. Puskesmas sebagai penggerak kesehatan masyarakat dan Desa/Kelurahan sebagai basis pemberdayaan masyarakat. DEKSI bukan dimaksudkan sebagai program yang berdiri sendiri, tetapi sebagai pendekatan yang mengintegrasikan berbagai upaya kesehatan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap dampak perubahan iklim.

Apa Itu Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI)?

Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI) merupakan konsep pengembangan Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali risiko perubahan iklim terhadap kesehatan, meningkatkan kapasitas masyarakat, melaksanakan tindakan adaptasi serta membangun sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

Dalam pengembangannya, DEKSI diarahkan untuk memiliki beberapa karakter utama, seperti:

1. Mampu mengenali potensi bahaya iklim;
2. Mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan;
3. Memiliki informasi mengenai masalah kesehatan yang sensitif terhadap perubahan iklim;
4. Memiliki kegiatan adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal;
5. Memiliki masyarakat yang aktif dalam menjaga lingkungan;
6. Memiliki sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan;
7. Memiliki jejaring lintas sektor;
8. Mampu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan penilaian kerentanan dan adaptasi kesehatan yang menempatkan Desa/Kelurahan sebagai salah satu tingkatan penting dalam memahami risiko perubahan iklim terhadap kesehatan.

Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja Sebagai Pilot Project DEKSI

Sebagai langkah awal pengembangan DEKSI di Kabupaten Banyumas, Desa Karangduren, wilayah kerja Puskesmas Sokaraja II, menjadi lokasi rintisan atau *pilot project*. Penetapan lokasi rintisan memiliki arti strategis. Desa Karangduren diharapkan dapat menjadi ruang belajar bersama bagi pemerintah daerah, Puskesmas, pemerintah Desa, kader, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan pendekatan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. Pilot project bukan semata-mata bertujuan untuk menghasilkan sebuah label atau status Desa sehat iklim. Lebih dari itu, kegiatan ini diarahkan untuk membangun model proses. Model tersebut dimulai dari mengenali masalah, memetakan risiko, menentukan kelompok rentan, menyusun prioritas, melaksanakan intervensi, melakukan pemantauan dan mengevaluasi hasil.

Dengan demikian, pengalaman Desa Karangduren dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penyempurnaan konsep DEKSI sebelum dikembangkan secara lebih luas di Desa/Kelurahan lainnya.

Tahapan Pengembangan DEKSI

Pengembangan DEKSI di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan secara bertahap agar setiap Desa/Kelurahan memiliki proses yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Tahap 1: Pengenalan dan Komitmen

Langkah pertama adalah membangun pemahaman bersama bahwa perubahan iklim merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Pemerintah Desa, Puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan unsur terkait perlu memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya membangun ketahanan masyarakat. Komitmen tersebut kemudian dapat dituangkan melalui kesepakatan bersama dan dukungan pemerintah Desa/Kelurahan.

Tahap 2: Identifikasi Bahaya Iklim

Desa bersama Puskesmas melakukan identifikasi terhadap potensi bahaya iklim yang mungkin terjadi di wilayahnya.

Bahaya tersebut dapat berupa:

1. Panas ekstrem;
2. Kekeringan;
3. Banjir;
4. Hujan ekstrem;
5. Angin kencang;
6. Longsor;
7. Gangguan kualitas udara;
8. Maupun kondisi lingkungan lain yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Identifikasi harus menggunakan informasi lokal sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata di masyarakat.

Tahap 3: Identifikasi Masalah Kesehatan

Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang berkaitan atau berpotensi dipengaruhi oleh perubahan iklim. Beberapa indikator yang dapat diperhatikan antara lain penyakit tular vektor, penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi, gangguan kesehatan akibat panas, masalah gizi, serta dampak terhadap kelompok rentan. Data Puskesmas dan data Desa dapat dipadukan untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan masyarakat.

Tahap 4: Pemetaan Kelompok Rentan

Perubahan iklim tidak memberikan dampak yang sama kepada seluruh masyarakat. Karena itu, DEKSI perlu memberikan perhatian khusus terhadap kelompok yang lebih rentan.

Pemetaan dapat mencakup:

1. Bayi dan balita;
2. Anak-anak;
3. Ibu hamil;
4. Lansia;
5. Penyandang disabilitas;
6. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi;
7. Masyarakat yang tinggal di lokasi berisiko;
8. Serta kelompok lain sesuai karakteristik wilayah.

Pendekatan terhadap kelompok rentan juga sejalan dengan dokumen nasional yang menekankan pentingnya memperhatikan kelompok rentan dalam penilaian kerentanan kesehatan akibat perubahan iklim.

Tahap 5: Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi

Setelah risiko dan kelompok rentan diketahui, Desa bersama Puskesmas dan lintas sektor menyusun rencana aksi. Rencana aksi hendaknya sederhana, realistis dan dapat dilaksanakan menggunakan sumber daya yang tersedia. Contohnya:

Bidang Kesehatan:

1. Penguatan surveilans penyakit sensitif iklim;
2. Peningkatan kewaspadaan terhadap DBD;
3. Penguatan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk;
4. Edukasi pencegahan gangguan kesehatan akibat panas;
5. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
6. Perlindungan kelompok rentan.

Bidang Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan sampah;
2. Pemeliharaan saluran air;
3. Penghijauan;
4. Perlindungan sumber air;
5. Peningkatan sanitasi;
6. Pengurangan tempat berkembang biaknya vektor.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kapasitas kader;
2. Pembentukan kelompok masyarakat peduli iklim;
3. Edukasi keluarga;
4. Kegiatan gotong royong;
5. Pemanfaatan potensi lokal;
6. Peningkatan literasi perubahan iklim dan kesehatan.

Bidang Ketahanan Pangan

1. Pemanfaatan pekarangan;
2. Pengembangan pangan lokal;
3. Diversifikasi pangan;
4. Pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan;
5. Edukasi konsumsi pangan bergizi.

Puskesmas Sebagai Penggerak DEKSI

Puskesmas mempunyai posisi penting dalam pengembangan DEKSI. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas memiliki data kesehatan masyarakat sekaligus kedekatan dengan kader dan masyarakat. Dalam konteks DEKSI, Puskesmas dapat berperan sebagai: Penggerak, Pembina, Fasilitator, Pemantau, Pusat Data Kesehatan Wilayah, dan sebagainya. Puskesmas dapat membantu Desa dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, menganalisis risiko, menyusun kegiatan adaptasi, melakukan edukasi masyarakat serta memantau indikator kesehatan. Puskesmas juga memiliki peran penting dalam membangun koordinasi lintas sektor. Pengembangan DEKSI tidak hanya menjadi tugas program kesehatan lingkungan atau penyakit tertentu, tetapi merupakan pendekatan bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai program di Puskesmas.

Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menjadi salah satu aktor utama dalam keberlanjutan DEKSI. Desa memiliki kewenangan, sumber daya dan struktur kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat. Dukungan pemerintah Desa dapat diarahkan pada:

1. Pembentukan tim atau kelompok kerja DEKSI;
2. Penyusunan rencana kegiatan;

3. Penguatan peran kader;
4. Mobilisasi masyarakat;
5. Pengelolaan lingkungan;
6. Kesiapsiagaan bencana;
7. Penguatan komunikasi risiko;
8. Dukungan pembiayaan sesuai ketentuan;
9. Monitoring dan evaluasi.

Dengan dukungan tersebut, DEKSI diharapkan menjadi bagian dari pembangunan Desa dan tidak berhenti sebagai kegiatan proyek. Membangun Masyarakat yang Tangguh terhadap Perubahan Iklim. Kekuatan utama DEKSI terletak pada masyarakat. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi menjadi pelaku utama adaptasi. Perubahan perilaku sederhana dapat memberikan manfaat yang besar apabila dilakukan secara konsisten. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi genangan air, menjaga sumber air, memilah dan mengelola sampah, menanam pohon, menjaga sanitasi, memperhatikan anggota keluarga yang rentan terhadap panas, serta segera mencari pelayanan kesehatan ketika mengalami keluhan kesehatan.

Prinsipnya adalah, masyarakat mengenali risikonya, mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu bertindak sebelum dampak menjadi lebih besar. Inilah yang dimaksud dari ketahanan masyarakat.

DEKSI Sebagai Gerakan Lintas Sektor

Perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana saja. Diperlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangannya.

Pengembangan DEKSI dapat melibatkan unsur:

1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
2. Puskesmas;
3. Pemerintah Kecamatan;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan;
5. Kader Kesehatan;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. BPBD;
8. Dinas Pertanian;
9. Dinas Pangan;
10. Dinas Pekerjaan Umum;
11. Lembaga pendidikan;

12. Dunia usaha;
13. Perguruan tinggi;
14. Organisasi Kemasyarakatan;
15. Dan unsur masyarakat lainnya.

Kolaborasi tersebut diperlukan karena risiko perubahan iklim memiliki dimensi yang sangat luas. Ketika terjadi kekeringan, misalnya, persoalannya tidak hanya mengenai kesehatan, tetapi juga menyangkut ketersediaan air, pertanian, ekonomi keluarga dan lingkungan. Demikian pula ketika terjadi banjir, dampaknya dapat menyentuh kesehatan, sanitasi, akses transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Indikator Awal DEKSI

Untuk memastikan bahwa pengembangan DEKSI berjalan terarah, diperlukan indikator yang dapat dipantau. Indikator tersebut dapat dikembangkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Banyumas.

Contoh kerangka indikator awal adalah sebagai berikut:

Nomor	ASPEK	INDIKATOR AWAL
1.	Kelembagaan	Tersedianya tim/keompok kerja DEKSI
2.	Komitmen	Adanya komitmen pemerintah Desa dan lintas sektor
3.	Pemetaan risiko	Tersedianya identifikasi bahaya iklim
4.	Kesehatan	Tersedianya data penyakit sensitif iklim
5.	Kelompok rentan	Tersedianya pemetaan kelompok rentan
6.	Lingkungan	Adanya kegiatan pengelolaan lingkungan
7.	Vektor	Pelaksanaan pengendalian vektor
8.	Sanitasi	Peningkatan perilaku sanitasi dan higiene
9.	Air	Perlindungan dan pengelolaan sumber air
10.	Kesiapsiagaan	Tersedianya mekanisme kesiapsiagaan masyarakat
11.	Pemberdayaan	Kader dan masyarakat aktif
12.	Monitoring	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Indikator tersebut merupakan kerangka awal yang perlu disempurnakan melalui proses pilot project di Desa Karangduren.

Pembelajaran Dari Pilot Project Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja.

Pelaksanaan pilot project DEKSI di Desa Karangduren diharapkan memberikan beberapa pembelajaran penting bagi Kabupaten Banyumas.

1. Bagaimana membangun komitmen pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Bagaimana mengintegrasikan data kesehatan dengan informasi lingkungan dan risiko iklim.
3. Bagaimana menentukan prioritas intervensi berdasarkan kondisi lokal.
4. Bagaimana membangun koordinasi antara Puskesmas dan pemerintah Desa.
5. Bagaimana meningkatkan peran kader dan masyarakat sebagai pelaku adaptasi.
6. Bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi secara sederhana namun tetap menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hasil pembelajaran tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun model pengembangan DEKSI yang lebih sesuai dengan kondisi Desa / Kelurahan lain di Kabupaten Banyumas.

Dari Satu Desa Menuju 331 Desa/Kelurahan

Pengembangan DEKSI di Kabupaten Banyumas tidak harus dilakukan secara serentak. Pendekatan yang lebih realistis adalah melakukan pengembangan bertahap. Desa Karangduren menjadi titik awal pembelajaran. Setelah proses tersebut dievaluasi, model yang telah disempurnakan dapat dikembangkan pada Desa/Kelurahan lainnya. Dengan 40 Puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, pengembangan DEKSI dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah kerja Puskesmas. Setiap Puskesmas dapat secara bertahap membina satu Desa/Kelurahan yang memiliki potensi risiko atau kebutuhan adaptasi yang tinggi. Dengan demikian, dalam jangka panjang dapat dibangun sebuah jejaring:

40 Puskesmas → 331 Desa/Kelurahan → Masyarakat Tangguh Iklim.

Konsep tersebut bukan sekedar memperbanyak jumlah Desa yang mengikuti program, tetapi membangun sistem ketahanan kesehatan yang semakin kuat dari tingkat masyarakat hingga tingkat Kabupaten.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pengembangan DEKSI. Evaluasi tidak hanya melihat apakah kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga apakah kegiatan tersebut memberikan perubahan. Monitoring dapat dilakukan secara berkala melalui Puskesmas bersama pemerintah Desa.

Beberapa hal yang dapat dipantau antara lain:

1. Perubahan kondisi lingkungan;
2. Kejadian penyakit sensitif iklim;
3. Kondisi kelompok rentan;
4. Pelaksanaan kegiatan adaptasi;
5. Keterlibatan masyarakat;
6. Kesiapsiagaan menghadapi bencana;
7. Serta hambatan dan kebutuhan dukungan.

Dokumen mengenai penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim juga menempatkan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan adaptasi. Dengan monitoring yang baik, kegiatan DEKSI dapat terus diperbaiki berdasarkan bukti dan pengalaman lapangan.

Tantangan Pengembangan DEKSI

Pengembangan DEKSI tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, diantaranya:

1. Membangun pemahaman masyarakat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan kesehatan.
2. Keterbatasan data pada tingkat Desa yang secara khusus menggambarkan hubungan antara risiko iklim dan kesehatan.
3. Perlunya koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
4. Keberlanjutan kegiatan setelah pilot project selesai.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas kader dan aparatur Desa.
6. Memastikan kegiatan adaptasi tidak menjadi kegiatan tambahan yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan kegiatan yang sudah berjalan.

Tantangan tersebut justru menjadi alasan pentingnya pilot project. Melalui Desa Karangduren, berbagai hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan menjadi bahan penyempurnaan model sebelum diterapkan secara lebih luas.

Strategi Keberlanjutan

Agar DEKSI dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan beberapa strategi.

1. Integrasi ke dalam perencanaan Desa. Kegiatan adaptasi kesehatan perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penguatan kader. Kader menjadi ujung tombak komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemanfaatan data. Keputusan intervensi perlu didasarkan pada data kesehatan, lingkungan, kependudukan dan kondisi sosial masyarakat.
4. Penguatan jejaring. Kemitraan dengan berbagai perangkat daerah, dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat perlu dikembangkan.
5. Komunikasi risiko. Informasi mengenai risiko iklim dan kesehatan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
6. Monitoring berkala. Setiap kegiatan perlu dievaluasi agar dapat diketahui efektivitas dan keberlanjutannya.

Menuju Banyumas Yang Tangguh Iklim

Pengembangan Desa/Kelurahan Sehat Iklim merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kesehatan yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. DEKSI mengajarkan bahwa kesehatan tidak hanya dibangun di dalam gedung Puskesmas. Kesehatan dibangun dari rumah, lingkungan, Desa, sekolah, tempat kerja dan ruang kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat mampu menjaga lingkungan, mengenali risiko, melindungi kelompok rentan, mengendalikan vektor, menjaga sumber air, memperkuat ketahanan pangan dan siap menghadapi bencana, maka masyarakat tersebut sesungguhnya sedang membangun ketahanan kesehatan. Kabupaten Banyumas memiliki modal yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut melalui jaringan 40 Puskesmas dan 331 Desa/Kelurahan. Pilot project di Desa Karangduren wilayah kerja Puskesmas Sokaraja II menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Dari satu Desa, diharapkan lahir sebuah model. Dari sebuah model, diharapkan tumbuh gerakan. Dan dari gerakan tersebut, diharapkan terbentuk masyarakat Banyumas yang semakin sehat, sadar risiko dan tangguh menghadapi perubahan iklim.

Penutup

Perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang membutuhkan respons bersama. Sektor kesehatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan pada saat yang sama memperkuat kemampuan masyarakat dalam mencegah serta mengurangi dampak kesehatan. Pengembangan Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI) di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis wilayah. Desa Karangduren sebagai pilot project di wilayah kerja Puskesmas Sokaraja II diharapkan menjadi laboratorium pembelajaran untuk membangun model DEKSI yang sederhana, terukur, partisipatif dan dapat direplikasi. Keberhasilan DEKSI bukan hanya ditentukan oleh

pemerintah. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu mengambil peran. Karena pada akhirnya, menghadapi perubahan iklim bukan hanya tentang bagaimana pemerintah merespons bencana setelah terjadi, tetapi tentang bagaimana masyarakat dipersiapkan untuk mengenali risiko, mencegah dampak dan bertindak lebih cepat. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Kabupaten Banyumas dapat membangun ketahanan kesehatan mulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Dari Desa Karangduren, kita mulai. Dari 40 Puskesmas, kita bergerak menuju 331 Desa/Kelurahan yang semakin sehat, tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim untuk menuju Banyumas PAS (Produktif, Adil, Sejahtera).

Daftar Pustaka:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Penilaian Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Barakallah fikum. Purwokerto, 30 Agustus 2026 (Oleh: Asri Tri Angkati)